

PENGARUH DITEMUKANNYA JARINGAN AL-QAEDA DI KAWASAN ASIA TENGGARA TERHADAP PERLUASAN KEHADIRAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA

DEWI TRIWAHYUNI

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sejak dinyatakan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap serangan 11 September 2001 terhadap Menara WTC dan Pentagon di Amerika Serikat, Kelompok Al-qaeda otomatis menduduki peringkat pertama dalam urutan kelompok teroris internasional yang paling dicari, khususnya bagi Amerika Serikat. Kendati kebenarannya masih dipertanyakan, Hal ini secara langsung merubah politik luar negeri AS tidak hanya kepada Afganistan sebagai negara asal dari Al-qaeda, tetapi juga berimplikasi terhadap politik luar negeri Amerika Serikat kepada negara-negara yang disinyalir oleh Amerika Serikat berpotensi sebagai tempat tumbuh kembangnya jaringan Al-qaeda seperti Asia Tenggara. Fakta ini juga yang mendorong Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya (military presence) di kawasan Asia Tenggara baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Peningkatan Militer Amerika Serikat di Asia Tenggara dilakukan Amerika Serikat dalam rangka memerangi terorisme Internasional.

Kata kunci: Al-qaeda, Military Presence, Amerika Serikat

PENDAHULUAN

Amerika Serikat telah membuktikan pada dunia tentang keseriusannya untuk memerangi terorisme internasional pasca serangan 11 September 2001. AS mengerahkan segenap kekuatannya mulai dari kekuatan fisik militernya sampai kekuatan politik internasionalnya. Hal ini semakin jelas terlihat ketika hanya dalam tempo kurang lebih tiga pekan dari serangan teroris itu, Dewan Keamanan PBB secara bulat menyetujui resolusi yang disponsori oleh AS untuk mengambil tindakan keras terhadap sumber-sumber finansial serta dukungan logistik bagi kelompok-kelompok teroris (Kompas, 30 September 2001).

Tragedi WTC 11 September 2001 telah mengubah banyak hal dalam cara orang Amerika memandang lingkungan dan diri mereka. Salah satu yang amat menonjol ialah soal keamanan diri; begitu banyak berita beredar dalam pekan-pekan setelah tragedi itu dan menimbulkan kecemasan yang luas seperti teror susulan dan serangan *anthrax*. Oleh karena itu juga pemerintah AS merasa perlu mendesak kongres agar menyetujui perluasan hak untuk menahan “tersangka teroris” asing.

Serangan 11 September 2001 dan Perubahan kepentingan serta Tujuan Kebijakan Pertahanan AS

Arah dan warna kebijakan AS memperlihatkan perubahan yang cukup

menyolok. Peristiwa 11 September tersebut terbukti memiliki peranan yang besar dalam mengubah kepentingan dan tujuan politik luar negeri AS. Setidaknya seperti yang dapat terlihat dalam *Quadrennial Defense Review Report 2001* (QDR) yang dikeluarkan *Department of Defense* (Departemen Pertahanan Amerika Serikat) pada akhir September 2001 menunjukkan perubahan orientasi yang cukup besar dalam tujuan-tujuan kebijakan pertahanan. Ada empat kebijakan baru (*defense policy goals*) yang tercatat dalam laporan tersebut :

- a. *Assuring allies and friends*;
Pada poin ini, tertulis bahwa AS tidak dapat mundur dari dunia internasional. Kehadiran kekuatan militer AS (*the presence of American Forces*) di luar wilayah AS adalah salah satu simbol utama dari komitmen AS terhadap aliansi dan negara teman bagi AS.
- b. *Dissuading future military competition*;
Melalui *strategy* dan *actions*, AS akan mempengaruhi bentuk kompetisi-kompetisi militer yang akan datang, bentuk-bentuk ancaman, dan melengkapi rencana militer untuk potensi-potensi musuh di masa mendatang.
- c. *Deterring threats and coercion against U.S. interests*;
Sebuah pendekatan multidimensi untuk strategi penangkalan (*deterrence*) sangat dibutuhkan. Meningkatkan kemampuan inteligen secara khusus sangat penting, sebagai aset yang mendukung kekuatan militer AS dalam memberikan informasi-informasi penting seperti perhatian, rencana, kekuatan dan kelemahan musuh.
- d. *If deterrence fails, decisively defeating and adversary*
Militer AS harus mempertahankan kemampuan untuk mendukung

perjanjian obligasi dan memerangi upaya-upaya musuh melawan AS, aliansi serta negara-negara teman AS (*U.S. Department of Defense, 2001*).

11 September telah merubah pandangan AS mengenai keamanan. Dapat dipastikan strategi dan kepentingan militer AS akan sangat dipengaruhi peristiwa tersebut. Bagaimana serangan 11 September ini begitu mempengaruhi kepentingan dan tujuan pertahanan AS dapat kita lihat dari pernyataan Sekretaris Pertahanan Donald H. Rumsfeld :

"Finally, the loss of life and damage to our economy from the attack of September 11, 2001 should give us a new perspective on the question of what this country can afford for its defense (Rumsfeld, 2001)".

Dalam laporan QDR 2001, AS kembali menegaskan bahwa tujuan kekuatan bersenjata AS adalah untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional, serta jika strategi penangkalan mengalami kegagalan harus mampu melakukan perlawanan pada ancaman-acaman terhadap kepentingan tersebut. AS memiliki kepentingan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap dunia. Sebagai sebuah kekuatan global (*global power*) dengan masyarakat yang terbuka, AS sangat dipengaruhi oleh *trend*, kejadian, dan pengaruh-pengaruh yang lain yang berasal dari luar wilayahnya. Oleh karenanya bagi AS pembangunan postur pertahanan harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan nasionalnya (*U.S. Department of Defense, 2001*) :

- a. *Ensuring U.S. security and freedom of action*, meliputi:
 - Kedaulatan (*sovereignty*) AS, integritas teritorial (*territorial integrity*), dan kebebasan (*freedom*)
 - Melindungi warga negara AS baik di dalam negeri maupun luar negeri

- Perlindungan terhadap infrastruktur strategis AS
- b. *Honoring international commitments*, termasuk:
- Keamanan dan kesejahteraan negara aliansi dan sahabat
 - Menghalangi permusuhan yang mendominasi wilayah-wilayah strategis, khususnya Eropa, Asia Timurlaut, pesisir Asia Timur, dan Timur tengah serta Asia Baratdaya.
 - Perdamaian dan stabilitas di *West hemisphere* (Dunia Barat)
- c. *Contributing to economic well-being*, termasuk:
- Vitalitas dan produktivitas ekonomi global
 - Keamanan internasional atas laut, udara dan ruang angkasa, dan jalur komunikasi informasi.

Keamanan lingkungan global yang berubah setelah 11 September juga mengubah carapandang atau perspektif AS terhadap keamanan. Perubahan-perubahan *trend* keamanan, ancaman-ancaman yang tidak terduga mendorong untuk dirumuskan strategi keamanan yang baru. Meskipun militer AS menikmati superioritasnya dalam berbagai dimensi konflik bersenjata, AS seolah-olah dihadapi tantangan dari musuh yang memiliki kekuatan besar, termasuk pendekatan asimetris dalam peperangan, khususnya senjata penghancur massa (*weapons of mass destruction*). Oleh karena itu AS sangat menyadari bahwa perubahan lingkungan keamanan dan tren geopolitik mudah berubah. Pasca 11 September kecenderungan lingkungan keamanan menjadi sangat unpredictable, tren geopolitik juga menunjukkan arah perubahan sehingga AS merasa perlu menyikapinya dengan membuat strategi yang memperhitungkan tren geopolitik dunia baru yang membentuk dunia.

Perubahan arah strategi AS berkenaan dengan hal ini antara lain :

a. *Diminishing protection afforded by geographic distance.*

Sebagaimana Peristiwa September 2001 secara mengejutkan memperlihatkan posisi geografis AS yang tidak lagi menjamin kekebalan dari serangan langsung terhadap populasi, teritori, dan infrastruktur AS. Ditambah lagi, globalisasi ekonomi dan peningkatan yang besar dalam travel dan perdagangan lintas batas AS telah menciptakan kerawanan terhadap negara dan aktor yang memusuhi dan dapat melakukan serangan terhadap tanah air AS.

b. *Regional Security Developments.*

Meskipun AS memandang tidak ada rival yang seimbang dalam beberapa waktu kedepan, tetapi ada kekuatan-kekuatan potensial di wilayah-wilayah strategis lain yang dapat mengancam kepentingan AS di wilayah tersebut.

c. *Increasing challenges and threats emanating from the territories of weak and failing states.*

Absennya pemerintahan yang capable dan bertanggung jawab di negara-negara Asia, Afrika, dan negara-negara Barat menciptakan ketertarikan para non-state actors untuk melakukan drug trafficking, terrorism, dan aktivitas lain yang menyebar melintasi batas-batas negara.

d. *Diffusion of power and military capabilities to non-state actors.*

Serangan 11 September yang lalu memperlihatkan bahwa baik motivasi maupun kemampuan kelompok teroris tersebut bertujuan untuk membuat serangan yang menghancurkan terhadap wilayah teritori, warga negara, dan infrastruktur AS.

- e. *Developing and sustaining regional security regional security arrangements.*

Bagi AS negara-negara aliansi dan negara-negara yang memiliki hubungan keamanan bilateral dengan AS merupakan bagian dari keamanan Amerika. AS memiliki kemampuan yang tidak dapat ditandingi dalam membangun koalisi diantara negara-negara untuk melawan tantangan-tantangan tertentu. Kemampuan ini menjadi sangat penting dalam menyikapi tragedi 11 September. Pengaturan keamanan ini dan potensi kekuatan yang dapat memungkinkan AS dan patner-nya untuk membuat persamaan dalam membentuk strategi wilayah, menjaga kepentingan bersama dan mengupayakan stabilitas.

- f. *Increasing diiversity in the sources and unpredictability of the locations of conflict.*

Trend ini akan menciptakan setting geopolitik yang meningkat secara kompleks dan tidak dapat ditebak. AS tidak akan dapat mengembangkan kekuatan militernya dan merencanakan secara individual untuk melawan musuh tertentu dalam are geografis tertentu. Oleh karena itu AS merasa terpaksa untuk melakukan intervensi dalam melawan musuh-musuh yang menciptakan krisis yang tidak diharapkan di wilayah tertentu.

Perubahan tren geopolitik dunia yang selalu berubah juga akan selalu merubah strategi pertahanan AS. Serangan 11 September yang secara khusus menyerang AS memberikan dampak yang luar biasa tidak saja bagi AS tetapi terhadap pola keamanan dunia. Saat ini, pemerintah AS kembali memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah keamanan, terutama perlindungan terhadap keamanan domestiknya.

AL-Qaeda sebagai Tersangka Utama Serangan 11 September 2001 pada Menara WTC dan Gedung Pentagon.

Ketika serangan 11 September 2001 terhadap menara WTC dan gedung pentagon terjadi, pada hari yang sama Presiden George W. Bush langsung menuduh mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut adalah AL-Qaeda. Dalam paragraf terakhir teks pidato presiden George W. Bush (<http://www.usinfo.state.gov>) pada tanggal 11 September 2001, Bush mengatakan:

“orang-orang sering bertanya pada saya, sampai kapan ini akan berakhir? Peperangan ini akan berakhir bersamaan dengan diseretnya Al-Qaeda ke pengadilan. Bisa saja terjadi besok, sebulan dari sekarang, bisa juga setahun atau dua tahun. Tapi kita akan menang..”

Alasan penting mengapa kelompok Al-Qaeda langsung ditetapkan sebagai tersangka utama, AS melihat beberapa indikasi yang membuat kekejaman yang terjadi pada 11 September 2001 merupakan tanggung jawab jaringan terorisme Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Menurut AS indikasi tersebut adalah (Deplu AS, 2001):

- Sebelum peristiwa 11 September terjadi, Bin laden mengisyratkan bahwa ia akan menyerang Amerika Serikat.
- Pada Agustus dan September, mata-mata bin laden di seluruh dunia diperintahkan untuk kembali ke Afghanistan sebelum 10 September.
- Seorang teman dekat bin Laden diketahui merancang secara matang rencana penyerangan 11 September.
- Dari 19 orang pembajak, setidaknya tiga orang diantaranya merupakan anggota jaringan terorisme Al-Qaeda. Setidaknya seorang pembajak diketahui terlibat dalam serangan

kapal angkatan laut Amerika Serikat USS Cole dan melakukan pengeboman kedutaan AS di Kenya dan Tanzania.

- Berdasarkan penelusuran terhadap gerakan pembajak sebelum 11 September, para penyidik menemukan beberapa diantara mereka bertemu dengan orang bin laden dan secara teratur menerima uang dan sokongan dari jaringan terorisme Al-Qaeda.

Al-Qaeda berdasarkan perspektif AS merupak kelompok terorisme yang diciptakan oleh Osama Bin Laden antara tahun 1984 dan 1986 (Rouiller, 2002), yang menampung para sukarelawan (*volunteers*), melatih dan kemudian dikirimkan ke Afghanistan melalui jaringan-jaringannya yang jumlahnya sangat banyak. Jaringan-jaringan Al-Qaeda ini berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan sumber-sumber dari intelegen AS, Al-Qaeda memiliki kriteria tertentu dalam memilih wilayah untuk mengembangkan jaringannya. Jaringan tersebut akan dipercaya secara organisasional dan operasional infrastruktur, sehingga wilayah tempat jaringan tersebut biasanya dengan kriteria tertentu, antara lain (Rouiller, 2002) :

- Negara Berkembang, secara politis tidak stabil, dengan komunitas muslim dan infrastruktur muslim (mesjid, pusat kebudayaan, lembaga-lembaga pendidikan Islami, dermawan, dan sebagainya) yang cukup besar jumlahnya.
- Adanya sejumlah kelompok agresor yang didukung oleh AS.
- Adanya kemungkinan atau celah untuk mengirimkan anggota-anggota Al-Qaeda yang tersembunyi identitasnya. Biasaya mereka dikirim pada komunitas-komunitas masyarakat muslim

Al-Qaeda juga digambarkan sebagai kelompok terorisme yang tentu saja sangat militan. Hal ini terlihat dari

bagaimana kelompok ini melatih para anggotanya tidak saja dengan “Brainwashing”, tetapi juga melatih kemampuan tempurnya. Peristiwa 11 September adalah bukti yang memperlihatkan bahwa kelompok teroris kini telah mampu meningkatkan kemampuan desdruktif-nya, dimana hanya penggunaan kekuatan militer negara yang dapat menanggulangnya (Gaddis, 2002).

Dengan beberapa kriteria wilayah pilihan untuk Al-Qaeda memperluas jaringannya, serta dengan karakter dan orientasi yang dijelaskan sebelumnya, memperkuat adanya pandangan yang mengatakan bahwa Al-Qaeda memiliki jaringan yang besar di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, karena jumlah populasi Muslimnya besar. Oleh karena ini Asia tenggara menjadi pilihan bagi Al-Qaeda itu memperluas jaringannya.

Menurut AS ada beberapa hal yang menjadi alasan Al-Qaeda untuk membangun jaringan di Asia Tenggara (Abuza, 2002) :

1. Ribuan penduduk Muslim Asia Tenggara pernah dan ikut bergabung dan berperang bersama pasukan Mujiheddin pada tahun 1980-an.
2. Sejak awal 1980-an juga gelombang orang Asia Tenggara yang belajar di Univesitas Islam dan Madrasah Timur Tengah bertambah secara dramatis.
3. Seringnya pemberontakan-pemberontakan masyarakat Muslim di kawasan Asia Tenggara terhadap pemerintahan yang bersifat sekuler (Saripudin HA, 2000). Islam radikal berkembang begitu cepat di kawasan ini bersamaan dengan perubahan negara-negara menjadi lebih sekuler.
4. Asia Tenggara merupakan “surga” bagi pertumbuhan jaringan teroris. Hal ini dikarenakan lemahnya kekuatan polisi dan aparat keamanan di Asia Tenggara, sehingga dengan mudah kelompok teroris beroperasi.

Selain itu, berdasarkan penyelidikan intelijen AS, ada perkembangan jaringan Al-Qaeda yang sangat cepat pada awal 1990-an, khususnya di kawasan Asia pasifik, yaitu setelah Osama Bin Laden berpindah dari Sudan ke Afghanistan pada Mei 1996. Oleh karena itu ada 3 poin perkembangan dalam formasi jaringan di kawasan Asia, (sumber: <http://www4.janes.com>), yaitu :

1. Al-Qaeda merekrut orang-orang Arab dan Asia yang pernah menjadi sukarelawan (jihad) anti-soviet.
2. Bin Laden telah mengkampanyekan dan mensosialisasikan Platform yang menggambarkan perekrutan atau diadopsi dari Timur Tengah dan negara-negara Asia.
3. Sejak awal 1990-an, Bin Laden membangun jaringan dengan dua group: the Moro Islamic Liberation front (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) di Philipina, yang telah membentuk para teroris dan kemampuan memberontak.

Terbongkarnya kelompok Jamaah Islamiah (JI) di Singapura semakin memperkuat bahwa AL-Qaeda memiliki jaringan yang kuat di Asia Tenggara. Apalagi setelah ditelusuri Organisasi JI ini memiliki cabang di Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan penyelidikan bersama intelijen Singapura, Malaysia, dan Philipina, Jamaah Islamiah yang berpusat di Singapura didirikan oleh Hambali yang masih menjadi buron dan Abdulah Ba'asyir yang berada di Indonesia. Hanya saja kepolisian Indonesia masih saja menyangkal peranan Ba'asyir dalam kegiatan terorisme (Clamor, 2002).

Bahwa kelompok Al-Qaeda sebagai kelompok teroris dengan kemampuan militer yang kuat dan hanya penggunaan kekuatan militer negara yang dapat menanganinya, serta tumbuh subur jaringan-jaringan Al-Qaeda di seluruh permukaan dunia, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan

perluasan militer AS di kawasan Asia Tenggara. AS melihat bahwa hanya dengan kekuatan militer dan kerjasama militerlah teroris internasional ini dapat diperangi dan Asia Tenggara merupakan wilayah dimana Al-Qaeda dapat tumbuh dengan cepat. Maka AS memiliki alasan yang kuat untuk memluas kehadiran militernya di Asia Tenggara.

Perkembangan kawasan Asia Tenggara dalam perspektif Amerika Serikat.

Pasca terjadinya serangan 11 September 2001, Asia Tenggara tiba-tiba saja menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus oleh negara-negara di dunia terutama oleh Amerika Serikat (AS). Sebelum serangan tersebut terjadi AS sebenarnya lebih memfokuskan perhatiannya terhadap negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah. Namun kemudian, ketika "war against terrorism" dikumandangkan AS, dengan cepat juga perubahan orientasi AS berpindah pada Asia Tenggara.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang labil secara politis dan ekonomi yang memuncak sejak tahun 1997. Ketika krisis ekonomi mulai meradang pada tahun 1997, diikuti dengan adanya krisis politik, Asia Tenggara juga diwarnai dengan gerakan-gerakan menentang pemerintahan termasuk gerakan-gerakan separatisme, bahkan aksi atau demonstrasi anti-Amerika.

Ketika "perang melawan terorisme internasional" mulai dikampanyekan, dengan Al-Qaeda sebagai tersangka kuat yang dituduh sebagai kelompok yang harus bertanggung jawab dibalik kejadian tersebut, maka dengan seketika pandangan AS khususnya dan negara-negara dunia memfokuskan diri terhadap negara-negara dengan populasi Muslim di dalamnya. Maka, Asia Tenggara pun menjadi pusat perhatian karena jumlah penduduk Muslimnya yang besar. Bahkan

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ditambah dengan Malaysia dan Brunei Darussalam negara dengan mayoritas muslim. Sedangkan Singapura, Philipina, dan Thailand mempunyai minoritas Muslim namun signifikan.

Menjadi khususnya perhatian AS terhadap kawasan ini pasca tragedi WTC, bahkan seorang analis kajian wilayah Asia/Pasifik (Gershman , 2002) di AS mengatakan bahwa saat ini Asia dapat dikatakan sebagai prioritas kedua AS dalam memerangi terorisme internasional. Asia Tenggara juga disebut sebagai “rumah” bagi kelompok-kelompok atau gerakan terorisme (seperti Jemaah Islamiah (JI), Abus Sayyaf dan Kumpulan Mujahideen Malaysia (KKM)) yang disinyalir terlibat dengan kasus WTC.

Terlepas apakah benar atau tidak mengenai keterlibatan kelompok-kelompok “Islam radikal” tersebut dengan kasus 11 September, yang jelas telah mengubah hubungan AS dengan negara-negara Asia Tenggara. Intensitas keterlibatan AS di Asia Tenggara merefleksikan apa yang selama ini terdengar dengan keras dari berbagai laporan-laporan pers dan berbagai kebijakan mengenai kekuatan dan bentuk ancaman terorisme disana (Gershman , 2002).

AS selama ini memiliki kecenderungan melihat Asia Tenggara melalui lensa Afghanistan yang akan mendorong pembuat keputusan AS pada kesimpulan dan kebijakan yang salah. Karena dengan analogi demikian AS akan memberikan pendekatan yang sangat militeristik. Sementara itu, gerakan politik Islam, baik yang dengan kekerasan (*violent*) dan yang anti-kekerasan (*nonviolent*), telah meningkat dan tumbuh dengan subur di Indonesia sejak President Soeharto jatuh pada 1998. Sejak pertengahan 1990, sejumlah serangan terorisme telah

direncanakan di kawasan Asia Tenggara, termasuk penyerangan terhadap kepala-kepala gereja (pope), presiden Bill Clinton, dan pesawat-pesawat komersial. Rencananya tersebut secara tidak sengaja gagal . semua faktor diatas, digabungkan dengan penangkapan beberapa orang-orang dari jaringan Al-Qaeda yang beroperasi di Asia Tenggara, terlihat sebagai faktor pendorong yang cukup kuat untuk melaksanakan perang terorisme di wilayah ini (Gershman , 2002).

Oleh karena itu, mengapa AS menyusun secara khusus Asia Tenggara sebagai “*second front*” AS dalam memerangi terorisme. Meskipun hal tersebut pada kenyataannya menghadirkan 4 masalah yang berbeda (Gershman , 2002), yaitu:

1. Upaya AS menjadikan Asia Tenggara sebagai urutan kedua dalam hal ini, terlihat tidak menyadari bahwa ada bentuk yang berbeda dalam politik Islam di kawasan ini,
2. AS melupakan bahwa kemunculan kelompok-kelompok teroris disebabkan oleh weak states, minimnya kerjasama internasional diantara negara-negara kawasan tersebut, dan sejumlah masalah-masalah sosial, ekonomi, ketidakseimbangan pembangunan, serta institusi demokrasi yang rapuh.
3. Pendekatan AS ini juga terlalu bergantung pada kerjasama militer yang tidak memperhitungkan dan sejalan dengan pelanggaran kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di Philipina dan Indonesia.
4. Kampanye As ini juga merupakan sebuah legitimasi atas perpecahan yang lebih besar pada perbedaan para pemimpin kawasan ini dalam memecahkan persoalan oposisinya masing-masing.

Selain kelompok-kelompok Islam keras, Asia Tenggara juga dikenal sebagai “rumah” bagi kelompok-kelompok atau

group militan lainnya yang menjadikan Islam sebagai elemen penting untuk identitasnya. Seperti yang terdapat di bagian selatan Thailand, Moro National Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Philipina, dan Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka) di Indonesia.

Tujuan dari kelompok-kelompok ini di satu sisi ada persamaan yaitu dalam menentang pemerintah, dan ada yang meminta hak/otonomi khusus, atau bahkan ingin memisahkan diri dari negara dan membentuk negara lain atau negara Islam. Tetapi ada juga group atau kelompok-kelompok yang memiliki tujuan lain namun cukup mendapatkan perhatian dari AS, yaitu kelompok-kelompok yang kerap melakukan aksi atau demonstrasi anti-Amerika. Di Indonesia ada yang disebut Islamic Defenders Front (Front Pembela Islam/FPI), yang berdiri sejak 1998 dan selalu aktif dalam menyuarakan anti-Amerika. Dan gerakan-gerakan ini semakin meningkat di negara-negara Asia Tenggara pasca peledakan WTC dan pasca penyerangan AS ke Afghanistan.

Namun demikian para kelompok tersebut sangat mampu memanfaatkan kelemahan-kelemahan pemerintah lokal, semakin tipisnya batas negara (borderless) akibat globalisasi, dan minimnya kerjasama internasional di kawasan ini. Semua faktor diatas mempermudah perpindahan baik orang maupun uang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain di dunia ini dengan sangat mudah.

Asia Tenggara juga dikenal sangat longgar dalam pengamanan keamanan terutama keimigrasian. Malaysia misalnya, tidak membutuhkan penggunaan visa bagi penduduk dari negara muslim lainnya. Sedangkan Filipina sangat dikenal dengan kelalaiannya dalam melakukan kontrol keimigrasiannya. Sedangkan Indonesia dan Thailand merupakan negara dengan

jumlah orang asing yang keluar masuk dengan mudah.

Persoalan lain yang menjadikan Asia Tenggara sangat rawan bagi perkembangan terorisme dalam perspektif AS adalah persoalan kurangnya law enforcement. Pada Februari 2002, the international Action task Force on Money Laundering, menyatakan bahwa Indonesia dan Philipina merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang dianggap tidak kooperatif dalam memerangi kejahatan *Money Laundering*.

Diketahui bahwa Thailand baru membuat hukum/kebijakan anti-money Laundering pada tahun 1999. Sedangkan Philipina baru saja mulai pada 2001. Akan tetapi Indonesia tercatat belum sama sekali mengambil tindakan bagi kejahatan tersebut, bahkan Indonesia belum memiliki legalitas hukum yang pasti untuk menangani kasus tersebut meskipun Indonesia selama ini dibantu oleh *Asian Development Bank* (ADB).

Selain tingkat kejahatan money laundering dan illegal transfer yang tinggi, kejahatan lain yang jumlahnya juga sampai pada tingkat yang rawan adalah acts of piracy (pembajakan laut). Kasus pembajakan di Asia Tenggara meningkat tajam setelah Perang Dingin berakhir. Meskipun angka kasus pembajakan di Asia Tenggara mengalami penurunan pada 2001, tetapi jumlah kasusnya tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 1999. Lebih dari 335 serangan pembajakan terjadi sepanjang 2001 di Asia, dan data dari International Maritime Bureau (IMB) menunjukkan bahwa 91 dari kasus pembajakan tersebut terjadi di laut atau perairan Indonesia.

Dari seluruh persoalan yang bermunculan baik sebelum serangan 11 September terjadi, maupun setelahnya, bagaimanapun telah menarik perhatian AS terhadap kawasan Asia Tenggara. Secara

dampak serangan 11 September bagi negara-negara Asia Tenggara adalah adanya perubahan perhatian dari persoalan transisi demokrasi kepada isu-isu stabilitas politik yang menjadi tantangan baru akibat suburnya gerakan Islam radikal (Snitwongse, 2002).

Namun yang menarik ada dampak yang berbeda dari peristiwa 11 September terhadap negara-negara ASEAN. Secara ekonomis peristiwa ini memberikan efek yang negatif (terutama bagi Indonesia) karena pemberitaan mengenai eksistensi jaringan terorisme dan image Ketidakstabilan serta ketidakamanan mengecilkkan tingkat investor asing dan turis di Asia Tenggara.

Secara politis, 11 September telah memberikan dampak positif bagi Malaysia dan Philipina. Hubungan Malaysia dengan AS kembali membaik dengan kesepakatan kerjasama memberantas terorisme, setelah Mahathir Muhammad sempat di kecam AS akibat kasus Anwar Ibrahim. Philipina menjadi sangat solid dan mau berlindung dibelakang AS dalam menyelesaikan pemberontak Abu Sayyaf, kelompok ekstrimis yang disinyalir memiliki hubungan kuat dengan Al-Qaeda. Hubungan antara AS-Philipina semakin menguat dengan prospek semakin besarnya dukungan AS terhadap pemerintahan presiden Gloria macapagal-Arroyo.

Dengan melihat begitu besarnya kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam rangka keinginan AS untuk menjadi motor “perang” melawan terorisme internasional, akan mempengaruhi kebijakan AS untuk Asia Tenggara. Perubahan yang paling adalah dalam kebijakan militer, dimana AS melihat Al-Qaeda sebagai kelompok teroris dengan kemampuan besar yang hanya mungkindapat diimbangi dengan penggunaan kekuatan militer. Maka

kehadiran militer AS di kawasan Asia Tenggara akan mengalami perluasan.

Perluasan Kehadiran Militer (Military Presence) Amerika Serikat di Asia Tenggara sebagai upaya memerangi terorisme internasional.

Asia Tenggara dalam peta kepentingan Amerika Serikat (AS) mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sejarah. Perubahan konsep AS mengenai kawasan Asia Tenggara secara dramatis terjadi ketika Perang Vietnam berakhir dimana dengan cepat Asia Tenggara menjadi kawasan yang tidak terlalu penting lagi bagi AS.

Akan tetapi perang Vietnam meskipun menjadi kepentingan utama, namun bukan merupakan satu-satunya alasan AS menghadirkan militernya di Asia Tenggara. Bagaimanapun Asia Tenggara menjadi penting tidak saja bagi AS tetapi juga bagi keamanan dunia, karena Asia Tenggara merupakan garis pantai laut terpenting untuk transportasi laut dunia, perdagangan dunia dan tentu saja untuk pergerakan militer AS khususnya. Ada dua kepentingan AS di Asia Tenggara (Smith, 2002), yaitu:

1. Asia Tenggara membuka garis laut, karena perdagangan dunia banyak sekali yang melewati jalur Malaka.
2. Asia Tenggara penting sebagai pos untuk pergerakan kehadiran militer AS di Pasifik Barat dan Samudra India.

Kehadiran militer AS di Asia Tenggara sendiri telah berlangsung cukup lama. Terutama sebagai akibat Perang Dingin, Kehadiran militer Asing meningkat, tidak saja untuk kepentingan kekuatan laut, tetapi juga untuk kekuatan udara dan darat. Dan selama masa Perang Dingin, kehadiran militer AS di kawasan Asia Tenggara dilatarbelakangi oleh dua tujuan utama (Alagappa, 1986), yaitu:

1. Memelihara status quo dalam mengatasi peningkatan kekuatan militer Uni Soviet (sekarang Rusia) di Asia Tenggara.
2. Memastikan antara negara sahabat dan aliansi AS di Asia Tenggara dalam melawan setiap ancaman-ancaman yang cukup besar untuk diatasi sendiri.

Sementara itu, paling tidak ada 2 (dua) alasan signifikansi strategi AS di Asia Tenggara : (1) sebagai penghubung antara Samudra pasifik, (2) masih berhubungan dengan kepentingan AS pada keamanan jalur laut (Alagappa, 1986). Secara garis besar kepentingan militer AS di Asia Tenggara pada saat itu adalah untukantisipasi dan memastikan keunggulan AS dari ancaman kekuatan Uni Soviet.

Berbeda ketika tragedi 11 September terjadi, secara serta merta kepentingan AS berubah. Tiba-tiba saja Asia Tenggara menjadi prioritas kepentingan AS setelah Timur Tengah. Kerjasama-kerjasama terutama di bidang militer gencar dilakukan AS dengan negara-negara Asia Tenggara. Namun bukan dengan mudah pula perubahan tersebut dilakukan AS, karena sementara Philipina dan Singapura sangat akomodatif terhadap kehadiran militer AS di negaranya, Indonesia justru sedikit keras dan menolak kehadiran militer AS di wilayahnya (Smith, 2002).

AS sejak awal serangan 11 September telah menyatakan keseriusannya dalam memberantas terorisme internasional, hal ini terlihat sangat jelas dalam laporan Quadrennial Defense Review (QDR) 2001, yang dikeluarkan dua minggu setelah 11 September, mengalami perubahan yang jelas dalam arah dan strategi kepentingannya, terutama dalam meningkatkan kemampuan militernya untuk memberikan perlindungan keamanan warga negara AS.

Cara pandang AS terhadap konsep keamanan juga berubah. AS tidak dapat

lagi menyombongkan kompleksitas institusi keamanan domestiknya, yang dianggap terlengkap dan tercanggih di dunia, pada kenyataannya tidak memberikan garansi keamanan apapun, terutama dari ancaman asimetris (non-state actor) seperti kelompok teroris.

Oleh karena itu, kehadiran militer AS (military presence) dipandang sebagai alat vital untuk kenyamanan keamanan di Asia Tenggara, dan ada perhatian bahwa kenyataan AS kekurangan strategi jangka panjang terhadap kawasan Asia Tenggara, dan ada kemungkinan pengurangan kehadiran militer di wilayah ini dapat mendorong pengaruh yang lebih besar bagi para aktornya untuk menentang kepentingan AS (The Asia Foundation, 2001).

KESIMPULAN

Pemikiran yang mendorong AS untuk menitik beratkan pengembangan militernya pasca 11 September, adalah bahwa dari perspektif militer, serangan yang terjadi dengan mudah tanpa resistensi yang berarti dari pihak yang berwenang di AS pada saat itu, telah memperlihatkan kelemahan intelegen dan pertahanan militer AS. Sementara selama ini dengan percaya diri AS menerima kenyataan sebagai negara adikuasa yang memenangkan rivalitas menghadapi Uni Soviet dalam perang dingin yang berlangsung selama beberapa dasawarsa.

Dengan ditetapkan AL-Qaeda sebagai tersangka utama peledakan 11 September dan resmi ditetapkannya Jamaah Islamiah (JI) sebagai jaringan Al-Qaeda, dimana AS mendapat legitimasi untuk memberantas jaringan tersebut, maka tidak ada lagi yang dapat menghentikan perluasan kehadiran militer AS di Asia Tenggara. Bahkan secara tidak langsung, sejak PBB belum menetapkan JI sebagai jaringan Al-Qaeda, AS telah lebih dahulu menetapkan kawasan Asia Pasifik

sebagai prioritasnya untuk melawan terorisme internasional dengan program yang disebut United States-Pacific Commamd (USPACOM).

Perluasan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dimulai dengan kerjasama yang dilakukan AS dengan Philipina, yaitu perjanjian yang ditandatangani 13 Febuari 2002 dimana kedua pihak sepakat untuk mengikutsertakan pasukan militer khusus AS dalam kegiatan patroli gabungan di daerah basis Abu Sayyaf di pulau Basilan.

AS juga mulai melakukan kerjasama dengan pemerintah Singapura, dimana Singapura menyediakan fasilitas dok bagi kapal-kapal perang milik AS, termasuk kapal induknya. Kesepakatan ini dinilai sangat signifikan oleh para pengamat militer AS sabgai kompensasi hilang pangkalan Subic di Filipina dari tangan AS. Sedangkan dengan Indonesia , tengah dilakukan persiapan diperbolehkannya tentara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan militer yang diselenggarakan AS.

Sejak 11 September, Thailand juga telah berkoordinasi secara penuh dengan AS dalam memerangi terorisme, dimana AS memberikan suplai untuk keperluan militer Thailand, dan sebagai barternya Thailand memberikan izin penerbangan pada wilayah udaranya, membuat pernyataan resmi kepada publik mengenai dukungannya, dan bekerjasama berbagi dan investigasi, juga dukungan untuk keperluan transit militer AS di Thailand.

Peningkatan kehadiran militer AS di Asia Tenggara yang berarti telah terlihat dari jumlah kehadiran pasukan AS yang terus bertambah di Filipina. Selain itu peningkatan juga terlihat dalam kesepakatan kerjasama militer AS dengan negara-negara Asia Tenggara mulai dari pendidikan dan pelatihan militer Filipina, Singapura, Vietnam dan Indonesia,

penyediaan fasilitas dok (singapura), kerjasama intelegen, sampai memberikan izin terbang dan transit bagi kepentingan militer AS dalam memerangi terorisme.

Dengan demikian signifikansi ditemukannya jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara telah memberikan pengaruh yang besar dalam perluasan kehadiran militer AS di Asia Tenggara. Dengan ditemukannya beberapa jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, maka secara signifikan kehadiran militer AS akan bertambah luas terutama dalam mendatangkan pasukan militernya di negara-negara Asia Tenggara dalam upaya AS untuk memberantas terorisme internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Zachary. 2002. *Tentacles of Terror: Al-Qaeda's Southeast Asia Linkages*. Honolulu. Asia Pasific Center fo Security Studies
- Alagappa, Muthiah. 1986. *US-ASEAN Security Co-operation Limits and Possibilities*. Malaysia. Institute of Strategic and International Studies (ISIS).
- Clamor, Ma Concepcion B.. 2002. *Terrorism and Southeast Asia: A Philipines Perspective*. Hawaii. Asia pasific Center for Security Studies.
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 2001. *Kampanye Amerika Serikat dan Dunia Internasional untuk Mengakhiri Terorisme Global*. Washington D.C. Department Of State.
- Gaddis, John Lewis. 2002. *A Grand Strategy of Transformation dalam Foreign Policy: November/Desember 2002*.

Gershman, John. 2002. Is Southeast Asia the Second Front? Dalam Foreign Affairs: July/August 2002.

HA, Saripudin. 2000. Negara Sekuler: Sebuah Polemik. Jakarta. P.T. Abadi.

Rouiller, Jean-paul. 2002. Transnational Violence and Seams of lawlessness in the Asia-Pasific: Lingkage to global Terrorism. Hawaii. Asia Pasific Center for Security Studies.

Rumsfeld, Donald H.. 2001. Quardrenial Defense Review. US Department of Defense.

Smith, Anthony. 2002. US security toward Saoutheast Asia After 11/9. Hawaii Asia Pacific Center for Security Studies.

Snitwongse, Kusuma. 2002. Southeast Asia in 2001: A Paradigm in Transition dalam Southeast Asian Affairs 2002. Singapore. Institute of Southeast Asian Studies.

The Asia Foundation, 2001. America's Role in Asia, Singapore. Asian Views.

U.S. Deparment of Defense. 2001. Quardrenial Defense Review: Defense Strategy.

Sumber Lain:

Al-Qaeda's Infrastructure in Asia, sumber: <http://www4.janes.com>

Defense, "Combating Terrorism in the Asia-pacific Region", sumber: <http://www.Defense.link>

Kompas, "AS-Filipina Sepakati Perjanjian Militer", Kompas, 14 Februari 2002 Department of

Paragraf terakhir dari pidato presiden George W. Bush, pada 11 Oktober 2001, sumber: <http://www.usinfo.state.gov>

State Department transcript of the Press Briefing, 05 Mart 2002: U.S. Pacific Chief Says Combating Terrorism in Asia-Pacific a Top Priority, Sumber : <http://www.usinfo.state.com>